

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam konsep otonomi daerah di Indonesia, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan penting terhadap peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintah daerah masing-masing. Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah terdapat faktor-faktor penting, antara lain : Faktor manusia yang meliputi kepala daerah beserta jajaran dan pegawai, seluruh anggota lembaga legislatif dan partisipasi masyarakatnya. Faktor keuangan daerah seperti dana perimbangan dan pendapatan asli daerah akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Faktor manajemen organisasi atau birokrasi yang ditata secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan daerah atau pengembangan wilayah. Salah satu upaya pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah yaitu melalui Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5 tentang otonomi

daerah. Yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah juga mendorong adanya kerjasama antar satu daerah dengan daerah lainnya. Otonomi daerah memungkinkan daerah yang lebih maju membantu daerah disekitarnya yang lemah.

Pada era otonomi daerah seperti ini, Kota Surabaya menerapkan langkah untuk meningkatkan kualitas layanan aparatur birokrasi dan sekaligus mengembangkan jasa layanan yang benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sebagai daerah yang telah diberi otonomi untuk melaksanakan berbagai kewenangan, Pemerintah Kota Surabaya melakukan berbagai tugas pelayanan kepada masyarakat tidak hanya pada tingkat dinas atau pemerintah kota melainkan pada tingkat kecamatan dan juga tingkat kelurahan. Dalam Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah ditegaskan bahwa salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah bagaimana memindahkan sebagian besar kewenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam

merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Secara teoritis, prinsip dasar dari penyelenggaraan pemerintah daerah adalah lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga proses pelayanan publik yang optimal tidak hanya dilakukan pada instansi induk atau dinas tetapi juga menyentuh hingga instansi pemberi layanan dibawah, yakni kecamatan dan kelurahan. Sesuai dengan amanat UU Pemda No.32/2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.19/2008 tentang kecamatan, disebutkan bahwa kecamatan memiliki berbagai kewenangan. Demikian halnya dengan Pemerintah Kota Surabaya, telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada kecamatan. Pemerintah Kota Surabaya yang dikepalai oleh walikota yang juga mengkoordinir wilayah administrasi kecamatan yang dipimpin oleh Camat. (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004). Melalui Peraturan Walikota Nomor 29 tahun 2009 tentang pelimpahan sebagian urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh kecamatan adalah : Pekerjaan Umum, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesehatan, Kebudayaan Pariwisata, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Perdagangan dan Perindustrian, Sosial, Pemerintahan dan Otonomi daerah. Dalam pelaksanaannya, Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2009 memiliki beberapa tahapan, yakni Tahap Pelaksanaan yaitu kecamatan

melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah dengan berpegang pada aturan yang berlaku dan didukung oleh sarana dan prasarana yang diperlukan. Tahap Pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh dinas atau badan dengan koordinator bagian Pemerintah dan Otonomi Daerah. Tahap pelaporan terhadap hasil pelaksanaan oleh masing-masing Camat kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap tiga bulan sekali.

Pengembangan wilayah merupakan upaya yang dilakukan untuk mendorong perkembangan sosial, ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup disuatu wilayah serta mengurangi kesenjangan antar wilayah (Zulaechah, 2011:16) Pengembangan wilayah diartikan juga sebagai strategi memanfaatkan dan mengkombinasikan faktor internal maupun eksternal yang ada pada daerah sebagai potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi wilayah. Kota Surabaya merencanakan pengembangan wilayah dengan memanfaatkan potensi unggulan pada setiap daerah. Struktur perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2020 masih didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 26,92 persen, kemudian Industri pengolahan sebesar 19,37 persen, Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 15,44 persen, Konstruksi sebesar 9,37 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 6 persen, Transportasi dan Pergudangan

sebesar 5,37 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,26 persen, Real Estate sebesar 2,77 persen, Jasa Pendidikan sebesar 2,62 persen, Jasa Perusahaan sebesar 2,55 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1,49 persen, Jasa Lainnya sebesar 1,25 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial sebesar 0,88 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,40 persen, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 0,16 persen; Pengadaan Air. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhannya, kategori Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,48 persen. Sebaliknya pertumbuhan terkontraksi oleh Kategori Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 2,43 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 1,66 persen, Konstruksi sebesar 0,53 persen, dan Lapangan Usaha Lainnya sebesar 0,91 persen.

**Tabel 1.1**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dan Harga Konstan 2010**  
**Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2020 (Triliun Rupiah)**  
**Kota Surabaya**

Lapangan Usaha (1)		Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2018 (5)	2019 (6)	2020 (7)
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	0,91	0,93	0,89	0,58	0,58	0,55

B	Pertambangan dan penggalian	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
C	Industri Pengolahan	101,19	109,21	107,42	73,32	77,27	76,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,31	2,36	2,24	1,54	1,55	1,45
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,77	0,79	0,82	0,58	0,61	0,63
F	Konstruksi	52,92	54,65	51,97	38,48	40,58	38,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	149,05	161,03	149,25	109,85	116,31	106,34
H	Transportasi dan Pergudangan	28,81	31,24	29,79	19,05	20,50	19,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	87,07	95,52	85,62	58,41	62,89	56,05
J	Informasi dan Komunikasi	28,39	30,77	33,25	25,61	27,53	29,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	28,14	29,41	29,18	18,54	19,19	19,23
L	Real Estat	13,78	14,95	15,35	10,17	10,78	11,00
M, N	Jasa Perusahaan	13,57	14,93	14,12	8,87	9,47	8,80
O	Administrasi	7,35	8,05	8,24	4,70	4,87	4,75

	Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib						
P	Jasa Pendidikan	12,90	14,01	14,54	9,06	9,67	9,93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,05	4,44	4,88	3,02	3,25	3,54
R,S ,T, U	Jasa Lainnya	7,60	8,16	6,92	5,50	5,82	4,87
<b>PDRB</b>		<b>538,85</b>	<b>580,49</b>	<b>554,51</b>	<b>387,30</b>	<b>410,88</b>	<b>390,94</b>

*Sumber : BPS Surabaya tahun 2020*

Kecamatan Gunung Anyar merupakan salah satu kecamatan di Surabaya bagian Timur. Kecamatan ini mempunyai luas sekitar 952 Ha dengan jumlah penduduk sekitar 60.500 jiwa pada tahun 2019. Kecamatan gunung anyar terdiri dari 4 kelurahan yang meliputi Kelurahan Gunung Anyar, Gunung Anyar Tambak, Rungkut Tengah dan Rungkut Menanggal. Untuk melihat sektor ekonomi yang paling berpengaruh di Kecamatan Gunung Anyar terhadap Kota Surabaya, dapat dilihat melalui PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto yang ada. Keadaan perekonomian suatu daerah merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam proses pembangunan daerah. Secara keseluruhan ekonomi Kecamatan Gunung Anyar dari tahun 2009 hingga tahun 2010 meningkat sebesar 1.79%. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi PDRB Kecamatan Gunung Anyar

sebesar 3.91% dan meningkat pada tahun 2010 sebesar 5,60% peningkatan tersebut menunjukkan bahwa perekonomian di Kecamatan Gunung Anyar sangat membanggakan. Adapun potensi unggulan pada Kecamatan Gunung Anyar adalah sebagai berikut : berbagai jenis UMKM salah satunya adalah Sentra Kampung Krupuk, letak kecamatan gunung anyar yang berbatasan langsung dengan kabupaten sidoarjo serta memiliki kawasan mangrove, kawasan pertanian dan tambak. Oleh karena itu diperlukan potensi unggulan yang dimiliki Kecamatan Gunung Anyar agar dapat berpengaruh pada tingkat pengembangan wilayah.

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk memfokuskan judul “Pengembangan Wilayah Berbasis Pada Potensi Daya Dukung Sosial Ekonomi (Studi Kasus Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana pengembangan wilayah berbasis sosial ekonomi di Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya ?



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

Untuk menganalisis secara mendalam pengembangan wilayah berbasis sosial ekonomi di Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam mendorong pengembangan teori administrasi berbasis otonomi daerah
2. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai sumber referensi bagi para peneliti untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi Peneliti**

Menambah wawasan bagi peneliti mengenai pengembangan wilayah berbasis pada potensi sosial ekonomi di kecamatan gunung anyar kota surabaya

## **2. Bagi Pemerintah**

Memberikan kontribusi serta manfaat agar dapat digunakan sebagai acuan atau masukan pada badan perencanaan daerah dan otonomi daerah

## **3. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau informasi kepada masyarakat Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, sehingga masyarakat dapat mengetahui manfaat penelitian ini.

### **1.5 Struktur Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang apa yang menjadi isi dari penulisan ini, dari penulisan ini maka dikemukakan susunan dan rangkaian masing-masing bab, sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang yang menjadi alasan dalam pemilihan judul, identifikasi masalah, tujuan melakukan penelitian atau analisis yang akan dilakukan dan struktur penulisan.

## **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan teori-teori yang menjadi landasan berfikir. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori otonomi daerah, pengembangan wilayah dan pengembangan wilayah berbasis sosial ekonomi. Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran penulis tentang penelitian yang akan dilakukan

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, daftar pertanyaan, informasi, teknik analisa serta trigulasi data

## **BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi data-data hasil penelitian yang dirinci menjadi deskripsi, lokasi, penyajian data lapangan, dan pembahasan terkait judul yang diangkat

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bagian akhir yang berisi penutup, kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran hasil penelitian